

# PERILAKU CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KANTOR CAMAT MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK

Oleh:  
**Florensius Oktaviardo Rukut**  
NIM. E420120166

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura  
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

E-mail : [florensiusoktaviardo94@gmail.com](mailto:florensiusoktaviardo94@gmail.com)

## Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perilaku Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan kurangnya pengawasan terhadap bawahannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perilaku Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Mempawah Hulu belum optimal, dengan indikator Sikap, Kemampuan dan Motivasi. Sikap camat tidak sepenuhnya mendukung penyelenggaraan pemerintahan kecamatan karena tidak diikuti dengan tindakan-tindakan yang kongkrit yang bisa mengsucceskan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Kemampuan camat dianggap kurang terutama yang berkaitan dengan kemampuan intelektual untuk merencanakan dan membuat suatu inovasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Begitu juga dengan motivasi camat masih dianggap rendah karena camat belum menyadari pentingnya penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya insentif, dan dukungan bawahan serta masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan agar camat mengubah perilakunya dengan mengubah sikap, meningkatkan kemampuan dan motivasinya agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

Kata-kata Kunci: Sikap, Kemampuan dan Motivasi.

## SUB-DISTRICT BEHAVIOR IN THE ORGANIZATION OF THE GOVERNMENT IN MEMPAWAH HULU SUB-DISTRICT OFFICE IN LANDAK REGENCY

### Abstract

The writing of this thesis points to describe and analyze the Behavior of Sub-District Government in Mempawah Hulu Sub-District Office in Landak Regency. The title of this thesis are appointed based on the problems of lack of supervision towards his subordinates. This research uses a type of descriptive study using qualitative approach. The location of the research is on the Mempawah Hulu Sub-District Office in Landak Regency. The conclusions in this study is Sub-district behavior in implementation at Sub-district Office is not optimal, with indicators of attitude, ability and motivation. The attitude of the Sub-district does not fully support the Organization of the Government of the Sub-district Head as it is not followed by concrete actions that can reaching the goal of the Organization of the Government Sub-district Head. The ability of the Sub-district are considered less especially with regard to intellectual ability to plan and create an innovation with regard to the conduct of the Government Sub-district Head. As well the motivation of Sub-district is still considered low because Sub-district still realize the importance of the Organization of the Government, the absence of incentives, and support subordinates as well as communities that are still low. Therefore, the writer expect Sub-district change their behavior by changing attitudes, motivations and capabilities in order to improve the Organization of the Government become better.

*Key words: attitude, ability and motivation.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995 : 4). Kondisi seperti ini tentunya tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia (Rachbini, 2002:198). Pendapat seperti itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri.

Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Sedangkan camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan ujung tombak bagi penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, karena pada tingkat kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan berhubungan secara

langsung dengan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan akan menunjang bagi penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Semua itu tidak terlepas dari peran camat sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Sementara itu, sebagai aparatur negara yang baik, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Dalam hal ini tidak terkecuali aparatur atau pegawai pemerintah Kecamatan Mempawah Hulu. Mereka dituntut untuk melayani masyarakat, bukan saja melalui perbaikan sistem prosedur yang digunakan, tetapi yang lebih penting adalah dengan meningkatkan kepemimpinan yang

baik. Di Kecamatan Mempawah Hulu itu sendiri dikehendaki agar setiap pemimpin, terutama camat, mampu mempergunakan sumberdaya manusia, dalam hal ini adalah para Aparatur dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Mereka juga diharapkan dapat lebih efektif dalam melakukan tugasnya dengan rasa tanggungjawab. Pemimpin, dalam hal ini, harus memahami situasi dalam organisasi atau instansi tempat mereka berkiprah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, dalam konteks ini, terdapat fenomena menarik Di Kantor Camat Mempawah Hulu yaitu Camat kurang disiplin dan kurang melakukan pembinaan kepada bawahannya, dalam hal kedisiplinan datang terlambat pulang awal sehingga berdampak kepada penyelesaian tugas yang tidak tepat waktu sesuai dengan standar oprasional, artinya sehingga dengan ketidak disiplin Camat selaku pimpinan sehingga mengakibatkan proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi terhambat, misalnya dalam pelayanan publik kepada masyarakat dalam hal pembuatan surat ahli waris, pembuatan surat kematian dll, penyelesaian tugas-tugas dalam

kaitan dengan tugas dan tanggung jawab Camat selaku pengambil kebijakan, yang seharusnya memerlukan tanda tangan Camat dalam pembuatan surat tersebut, dengan demikian Camat tidak ada ditempat, akibatnya banyak sekali masyarakat yang kecewa. Karena Camat kurang berkoordinasi dengan kasi pemerintahan, sehingga dibagian kasi pemerintahan dalam pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pembuatan surat menyurat menjadi terhambat.

Berdasarkan pengamatan penulis selama mengikuti PPK di Kantor Camat Mempawah Hulu ketika jam kantor dimulai belum ada seorang pun pegawai yang datang ke kantor padahal itu sudah jam 9 pagi. Akibatnya penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat menjadi terhambat dalam hal pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada hari itu juga. Kondisi demikian, secara tidak langsung, berdampak terhadap kemampuan Camat dalam memimpin serta membina pegawai agar mempunyai disiplin kerja yang baik guna kelancaran jalannya pemerintah kecamatan, oleh karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban untuk membina disiplin

kerja pegawai kantor Kecamatan. Sehingga peran kepemimpinan Camat dalam hal menciptakan suasana kerja yang baik kurang nampak. Maka dari itu Camat harus memiliki kekuatan untuk menemukan dan mengayomi bawahannya sehingga tercipta budaya kerja yang baik atau kedisiplinan kerja yang membawa pemerintahan yang unggul.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku camat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah faktor kepemimpinan, Pemimpin yang ideal mampu menerapkan dan mencurahkan segala perhatiannya kepada para pegawainya, agar moral mereka tumbuh sedemikian rupa. Perilaku pemimpin merupakan unsur yang sangat menentukan baik atau buruknya suatu organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Perilaku pemimpin merupakan inti dari kerja pemerintah dalam proses mencapai tujuan dari proses pemerintahan. Sukses tidaknya kegiatan pemerintahan itu sebagian besar bergantung pada kualitas kepemimpinan sosok yang memimpin proses pemerintahan itu.

Perilaku Camat di Kecamatan Mempawah Hulu dapat dikatakan

kurang efektif, berdasarkan pengamatan dilapangan yang dilakukan peneliti, bahwa Camat di Kecamatan Mempawah Hulu jarang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan jajaran mengenai permasalahan yang ada dikantor Camat seperti dalam hal pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan administrasi kependudukan sehingga Camat tidak peduli dengan masalah dikantor, yang mana seharusnya camat sebagai pemimpin di Kecamatan turut serta memberikan solusi dan memberikan pembinaan agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, diperlukan tentang kemampuan camat tidak hanya dinilai dari hasil pekerjaan saja tetapi dari segi pembinaan terhadap pegawainya juga menjadi suatu penilaian terhadap kemampuannya.

Selanjutnya, dari fenomena tersebut di atas tidak hanya sikap dan kemampuan, tetapi motivasi dari Camat juga dapat mempengaruhi kedisiplinan para pegawai. Menurut Mitchell (dalam Winardi, 2002:42), motivasi mewakili proses-proses psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, diarahkan dan terjadinya

presistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Gie ( dalam Winardi, 2003:33), bahwa motivasi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin dalam memberikan inspirasi, semangat dan dorongan kepada orang lain ( pegawai ) untuk mengambil tindakan-tindakan.

Dari pengertian diatas, selama mengikuti PPK penulis menemukan fenomena tidak ada motivasi dari Camat untuk adanya perubahan bagi staf/pegawai, sehingga staf/pegawai hanya mengikuti perilaku yang tidak baik dari camat tersebut. Melihat hal tersebut tentu dibutuhkan motivasi dari seorang pemimpin dalam hal ini Camat untuk mempengaruhi bawahannya menjadi lebih baik, agar penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mempawah Hulu dapat terselenggara sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, menurut peneliti terdapat indikasi bahwa dalam kepemimpinan Camat Mempawah Hulu dalam berperilaku tidak efektif bagi bawahannya, yaitu meliputi ketepatan waktu hadir, pulang kantor, penyelesaian tugas yang tidak tepat waktu, dan secara

keseluruhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Realitas itu sedemikian rupa memunculkan dugaan bahwa camat selama ini belum pernah memberikan motivasi yang positif dari Camat kepada bawahannya. Serta diduga bahwa camat kurang melakukan pengawasan dalam pelayanan administrasi terhadap bawahannya. Oleh karena itu masalah terhadap realita diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul *“Perilaku Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak”*.

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada teridentifikasi bahwa perilaku camat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

1. Camat tidak disiplin, sehingga mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kurangnya kemampuan Camat dalam berkomunikasi dan berkoordinasi kepada bawahannya.
3. Tidak adanya motivasi dari Camat kepada bawahannya.

## 3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak menimbulkan interpretasi yang sangat luas mengingatkan luasnya masalah yang dihadapi oleh penulis, maka penelitian ini hanya membahas tentang perilaku birokrasi. Khususnya yang berkaitan dengan sikap, kemampuan dan motivasi camat dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan publik pemerintahan di Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak.

## 4. Rumusan Permasalahan

Perumusan masalah yang dapat dibuat berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada bagian latar belakang masalah, yaitu *“Mengapa perilaku Camat Mempawah Hulu dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan publik pemerintahan masih belum optimal”*.

## 5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku camat

yang belum optimal di Kecamatan Mempawah Hulu.

## 6. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan terhadap ilmu sosial, khususnya bidang kepemimpinan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### 2. Manfaat Praktis

1. Bagi desa karangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan perilaku camat.

2. Bagi pihak Kecamatan, khususnya Pemerintah Kecamatan Mempawah Hulu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan, mengenai perilaku camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## B. TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Teori Konsep

#### A. Konsep Perilaku Birokrasi

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ikut ditentukan oleh perilaku aparatnya dalam mengemban misi sebagai pelayan masyarakat, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pelayanan publik belum optimal karena tidak tersedianya aparat pelayanan yang profesional, berdedikasi, akuntabel dan responsif serta loyal terhadap tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Perilaku birokrasi baik yang membangun citra pelayanan publik berkualitas prima maupun yang berperilaku

sebaliknya, tampaknya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal yang dianut oleh setiap individu birokrat.

Perilaku birokrasi timbul sebagai akibat interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi. Karakteristik individual mencakup persepsi, pengambilan keputusan pribadi, pembelajaran dan motivasi (Robbins, 2003:31). Menurut Thoha (2002) bahwa karakteristik individual meliputi kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan. Perbedaan karakteristik individu tersebut menyebabkan perbedaan perilaku mereka. Setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda. Mereka mempunyai nilai, kepercayaan, motivasi, dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan perilaku mereka. Namun demikian ikatan utama yang menyatukan perilaku mereka adalah tujuan organisasi. Hal ini penting mengingat perilaku mengarah kepada tujuan organisasi. Organisasi birokrasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pelayanan dan perlindungan masyarakat mempunyai karakteristik adanya hirarki, tugas, wewenang,

tanggungjawab, sistem reward, dan sistem kontrol (Thoha, 2002). Menurut Lubis dan Martani (1987), dan Robbins (2003), karakteristik birokrasi mencakup spesialisasi, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi dan formalisasi. Dengan karakteristik yang dimilikinya, birokrasi dapat mengelola fungsi-fungsi organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu menurut Gibson (1989), struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia yang mengendalikan organisasi. Adapun Robbins (2003) menjelaskan bahwa perilaku mengarah kepada pencapaian tujuan dalam organisasi. Salah satu fungsi birokrasi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Konsep Perilaku**

Perilaku adalah sikap atau tindakan atau semua yang dilakukan manusia, misalnya bekerja dengan giat dan malas, berbicara dengan teman dan atasannya, menolak atau menerima tugas yang dibebankan atau sebagainya (Robbins, 2003:39).

Perilaku organisasi pada hakekatnya adalah hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya, sehingga menjadi karakteristik suatu organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan perilaku dalam organisasi adalah sikap atau tindakan (tingkah laku) seseorang manusia (individu) dalam organisasi sebagai ungkapan dari kepribadian, persepsi dan sikap jiwanya, yang semuanya dapat berpengaruh terhadap prestasi (kinerja) dirinya dan organisasi (Robbins, 2003-39).

Menurut Thoha (2002-35) perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Ini berarti bahwa seseorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Individu dengan organisasi tidak jauh berbeda dengan pengertian ungkapan tersebut. Keduanya mempunyai sifat-sifat khusus atau karakteristik tersendiri dan jika kedua karakteristik ini berinteraksi maka akan menimbulkan perilaku individu dalam organisasi.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi. Menurut Thoha dalam bukunya yang berjudul *Birokrasi Indonesia*

*Dalam Era Globalisasi* (1995:138), perilaku birokrasi adalah “pada hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya”.

Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai “patologi birokrasi” atau gejala penyimpangan birokrasi (*dysfunction of bureaucracy*). Kesulitan yang timbul bahwa secara teoritis tidaklah mudah membedakan dan menetapkan batas antara “perilaku” yang telah membudaya dengan perilaku menyimpang yang berulang-ulang atau berlangsung dalam waktu cukup lama.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah, penelitian ilmiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menemukan jawaban dan menjelaskan permasalahan yang diteliti guna untuk menemukan pemecahan masalah yang diteliti. Sedangkan metode merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penelitian. Untuk itu dalam melakukan penelitian terhadap Perilaku Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Camat Mempawah Hulu

Kabupaten Landak dapat menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan memberikan gambaran serta fakta-fakta sesuai keadaan dan objek penelitian yang ada dilapangan untuk memecahkan masalah. Sugiyono (2005:1) menjelaskan bahwa "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, tidak diharuskan melakukan pengujian statistik, informasi disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitiannya bagaimana Perilaku Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak.

belum optimal di Kecamatan Mempawah Hulu.

yang kemudian akan peneliti bahas dengan menggunakan teori Faktor-faktor pembentuk perilaku oleh Thoha (2002)

### **1. Sikap Camat Mempawah Hulu**

Berdasarkan penjelasan beberapa informan yang peneliti teliti dan wawancara, berkaitan dengan Sikap Camat Mempawah Hulu menyimpulkan bahwa, walaupun mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun akan tetapi belum berjalan dengan optimal karena telah merasa puas dengan hasil kerjanya selama ini sehingga tidak memiliki keinginan lebih lagi untuk meningkatkan kinerjanya dan berdampak pula pada komitmennya terhadap tugas pemerintahan Kecamatan yang seharusnya lebih memaksimalkan lagi dalam hal pembangunan yaitu pada penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan di Mempawah Hulu .

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku camat yang

### **2. Kemampuan Camat Mempawah Hulu**

Berdasarkan penjelasan beberapa informan yang peneliti teliti dan wawancara, berkaitan dengan kemampuan Camat Mempawah

Hulu menyimpulkan bahwa, belum optimalnya kemampuan Camat Mempawah Hulu yaitu dapat dilihat dari kemampuan fisik dan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh Camat. Walaupun secara fisik, tidak ada yang bermasalah dengan Camat Mempawah Hulu, namun akan tetapi Camat belum memaksimalkan kemampuannya secara optimal yang berkaitan dengan kemampuan fisik. Sedangkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh Camat Mempawah Hulu masih belum optimal pula karena tingkat pendidikan Camat hanya tamatan Sarjana dan selama menjabat belum pernah melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kepemimpinannya sebagai Camat. Hal ini tentu berdampak pada kurang berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan, sehingga belum dapat berjalan dengan maksimal Pemerintahan di Kecamatan Mempawah Hulu.

### 3. Motivasi Camat Mempawah Hulu

Berdasarkan penjelasan beberapa informan yang peneliti teliti dan wawancara, berkaitan dengan Motivasi Camat Mempawah Hulu menyimpulkan bahwa, belum

optimalnya Motivasi Camat Mempawah Hulu yaitu dapat dilihat dari kedua motivasi yaitu internal dan eksternal. Dilihat dari Keinginan untuk berprestasi pada diri Camat memang ada tapi belum maksimal karena keterbatasan kemampuan dan banyak pekerjaan yang lebih penting dibandingkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. Hal ini yang membuat motivasi Camat kurang optimal adalah tidak adanya insentif dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan ini serta dukungan bawahan dan masyarakat yang hanya seadanya sehingga tidak banyak membantu untuk memaksimalkan proses penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Mempawah Hulu.

### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan secara umum bahwa perilaku camat Mempawah Hulu belum optimal atau belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kantor Camat Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Hal ini dapat dilihat dari keadaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sekarang ini. Kurang optimalnya perilaku camat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk perilaku yaitu:

1. Sikap Camat Mempawah Hulu.

Sikap Camat walaupun mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tapi belum optimal karena telah merasa puas dengan hasil kerjanya selama ini sehingga tidak memiliki keinginan lebih lagi untuk meningkatkan kinerjanya dan berdampak pula pada komitmennya terhadap tugas pemerintahan Kecamatan yang harus memaksimalkan pembangunan yang dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

2. Kemampuan Camat Mempawah Hulu. Kemampuan Camat Mempawah Hulu ini belum optimal dan dapat dilihat dari kemampuan fisik dan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh Camat. Walaupun secara fisik, tidak ada yang bermasalah dengan Camat Mempawah Hulu belum

memaksimalkan kemampuannya secara optimal yang berkaitan dengan kemampuan fisik. Sedangkan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh Camat Mempawah Hulu masih belum optimal pula karena tingkat pendidikan Camat hanya tamatan Sarjana dan selama menjabat belum pernah melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kepemimpinannya sebagai Camat. Hal ini tentu berdampak kurang pada kurang berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan.

3. Motivasi Camat Mempawah Hulu. Motivasi Camat Mempawah Hulu ini belum optimal dan dapat dilihat pula oleh motivasi internal dan eksternal yang dimiliki oleh Camat. Keinginan untuk berprestasi pada diri Camat memang ada tapi belum maksimal karena keterbatasan kemampuan dan banyak pekerjaan yang lebih penting dibandingkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. Hal ini yang membuat motivasi Camat kurang optimal adalah tidak adanya insentif dalam penyelenggaraan pemerintahan

Kecamatan ini serta dukungan bawahan dan masyarakat yang hanya seadanya sehingga tidak banyak membantu.

## E. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Camat Mempawah Hulu harus memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan menggerakkan bawahannya dengan lebih maksimal dan menghimpun potensi-potensi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan ini. Dan yang lebih penting lagi Camat harus mensosialisasikan tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
2. Camat harus memaksimalkan kemampuannya agar penyelenggaraan pemerintahan ini bisa berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal kemampuan fisik, Camat hanya perlu menjaga kesehatan, stamina serta kebugarannya agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik terutama dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. Sedangkan untuk

kemampuan intelektual, Camat harus mengasah kemampuan intelektualnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mempawah Hulu bisa lebih efektif.

3. Camat harus terlebih dahulu menyadari sepenuhnya tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan bagi masyarakat Kecamatan. Camat juga harus lebih kreatif dan inovatif lagi agar penyelenggaraan pemerintahan ini bisa lebih optimal.

## F. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh peneliti sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian yang tentu akan berdampak pula bagi kesempurnaan penulis skripsi ini. Untuk itu perlu peneliti kemukakan sebagai bahan evaluasi demi kesempurnaan penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan peneliti yang masih belum maksimal dalam mengelola data-data yang ada maupun dalam mengumpulkan data dengan teknik

yang digunakan karena peneliti merupakan peneliti pemula.

2. Pihak informan cenderung memberikan informasi yang berupa informasi yang baik-baik saja sehingga teknik wawancara secara mendalam tentang permasalahan tidak maksimal, sehingga perlu menggunakan teknik-teknik lainnya dengan maksimal.
3. Kesulitan dalam memperoleh data yang diperlukan karena pengarsipan dokumen di lembaga yang diteliti masih kurang baik.

## G. REFERENSI

### Buku:

Sugiyono 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*: Bandung CV Alfabeta.

Sedarmayati. 2004. *Good Governance (Kepemimpinan yang baik)* bagian dua. Bandung: Mandar Maju

Harbani Pasolong. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*: Bandung: CV Alfabeta

Kartono, kartini 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Rivai,veithzal. 2004.*Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: raja grafindo persada

Aynul. 2009. *Leadership: Definisi Pemimpin*

Mujiono.imam. 2002. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*.Yogyakarta : UII Press.

Miftah Thoha. 2007. *Kepemimpinan dalam Manajemen*: jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Stephen Robbins. 2008. *Perilaku Organisasi (konsep,kontroversi dan aplikasi)*. Edisi bahasa indonesia.Jakarta:PT.Bhuana Ilmu Populer.

Djarmiko, Yayat Hayati. 2005. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Alfabeta.

Safari, Triantoro. 2004. *Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syafie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.

Ahmad Tohardi. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung : Mandar Maju.

Wahjono, Sentot Imam. 2010. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : Graba Ilmu.

### Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

### Skripsi atau Tesis

Nicolaus Purwanto. 2013. *Perilaku Kepala Desa Dalam Pendirian Perpustakaan Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu*. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Pernando. 2014. *Perilaku Pemimpin Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai*

**Negeri Sipil Di Badan Pemberdayaan  
Masyarakat Dan Pemerintahan Desa  
Provinsi Kalimantan Barat. Universitas  
Tanjungpura Pontianak.**





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Florensus Oktaviardo Rukut  
NIM / Periode Lulus : E42012066 / 2016  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : florensusoktaviardo94@gmail.com / 089651766335

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERILAKU CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KANTOR  
CAMAT MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada) Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui  
Ketua Pengelola Program Studi  
Ilmu Pemerintahan



Dibuat di Pontianak  
Pada Tanggal Januari 2017

(Florensus Oktaviardo Rukut)